KONSEPTUALISASI METODE PENEMUAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *COUNTER ACCOUNTING*

Dayno Utama

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Kampus LIPI Gd. 20 Jl. Sangkuriang, Bandung, Jawa Barat 40135
Email: dayno.utama.sn@lipi.go.id

Submitted: 06 October 2017, **Reviewed:** 02 November 2017, **Accepted:** 30 October 2019

Abstract

One formulation of counter accounting principles has been sought to be formulated in the form of the need for counter accounting researcher to notice and comply to applicable law, but there is yet efforts that counter accounting researcher can do to acquire legal knowledge and comply to it in conducting research. This research is conducted by documentation method or document analysis. The results show that the effort that can be done by counter accounting researcher is to do legal finding, because this approach has been done by every justice seeker especially those pertinent to legal case. In addition, the results also indicate that the law has a conceptual diversity. From the conceptual diversity there is a legal research that has similarities with some counter accounting principles, namely participative-transformative legal research.

Key words: *counter accounting, legal finding, legal research, accounting research.*

Abstrak

Salah satu rumusan prinsip *counter accounting* telah diupayakan untuk dirumuskan berupa perlunya peneliti *counter accounting* memperhatikan dan mematuhi aturan hukum, akan tetapi masih belum diketahui upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhi dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi atau disebut juga analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum adalah dengan melakukan penemuan hukum, karena penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pencari keadilan terutama para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki keragaman konseptual. Dari keragaman konseptual tersebut terdapat penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan beberapa prinsip *counter accounting*, yaitu penelitian hukum transformatif-partisipatoris.

Kata kunci: akuntansi perlawanan, penemuan hukum, penelitian hukum, penelitian akuntansi.

Latar Belakang

Berdasarkan kondisi penelitian akuntansi yang sangat kurang inovatif dan tidak memiliki dampak terhadap praktik akuntansi, maka telah ada upaya perlawanan untuk memicu kreativitas dan inovasi penelitian akuntansi yang dilakukan oleh beberapa peneliti akuntansi dimana upaya perlawanan tersebut secara tidak disadari telah memanfaatkan filosofi punk. Dengan menggunakan teknik berargumentasi, telah ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa filosofi punk sebagai budaya perlawanan (*counter culture*) dapat dimanfaatkan untuk penelitian akuntansi melalui perumusan prinsip akuntansi yang memanfaatkan filosofi punk yaitu *counter accounting* (akuntansi perlawanan).¹

Salah satu prinsip *counter accounting* tersebut adalah prinsip kreatifitas tanpa batas dalam berbagai keterbatasan dan pembatasan. Pembatasan tersebut menurut Rianto Adi² adalah bahwa dalam melaksanakan suatu penelitian perlu adanya perhatian dan kepatuhan terhadap aturan hukum serta etika penelitian yang berlaku, karena dengan adanya hukum dan etika tersebut dapat diupayakan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan dari kegiatan penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Rianto Adi³ mengingatkan kepada semua pihak bahwa penyimpangan dalam penelitian yang dapat membahayakan kehidupan akan mendapat sanksi. Pada saat yang sama Rianto Adi⁴ juga mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanya akan dapat berkembang dengan baik apabila kebebasan dan tanggungjawab akademis dapat dijamin oleh Negara. Sinergi antara kreatifitas dan kepatuhan ini merupakan konsep dasar pengembangan *counter accounting*.⁵

Walaupun demikian meski salah satu rumusan prinsip *counter accounting* tersebut telah diupayakan untuk dirumuskan, akantetapi masih belum diketahui upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhi dalam melakukan penelitian, oleh karena itu maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhi dalam melakukan penelitian?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, karena melakukan penelitian terhadap benda-benda tertulis yang disebut juga sebagai dokumen

1 Dayno Utama, "Upaya Perumusan Prinsip Counter Accounting dengan Memanfaatkan Filosofi Punk Sebagai Counter Culture", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 6, No. 3*, (Desember 2015): 444-465, doi: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6036>.

2 Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 105.

3 *Ibid.*, hlm. 50.

4 *Ibid.*, hlm. 48.

5 Dayno Utama, "Islamisasi Prinsip Counter Accounting", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11, No. 2* (Maret 2017): 477-498, doi: <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.477-498>.

seperti buku-buku dan peraturan-peraturan.⁶ Metode dokumentasi ini dapat disebut juga sebagai analisis dokumen.⁷ Penggunaan metode dokumentasi ini menjadi tidak terhindarkan ketika peneliti mencari landasan hukum berupa ketentuan atau peraturan.⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pedoman pengumpulan dokumen⁹ berdasarkan pertanyaan penelitian.¹⁰ Analisis dokumen dimulai ketika melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang dianggap dapat bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan.¹¹ Mestika Zed menyarankan untuk peneliti pemula agar memulai pengumpulan bahan penelitian berupa artikel dalam jurnal ilmiah, tetapi jika sulit menemukan bahan yang tepat, maka mulailah dengan buku teks yang paling lazim dipergunakan di bidangnya,¹² karena setiap bidang disiplin ilmu tertentu tentu memiliki buku standar di bidangnya atau buku rujukan khusus mengenai aspek-aspek tertentu.¹³ Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian dilakukan upaya untuk mengenal buku-buku teks standar yang paling relevan dengan

penelitian ini, diantaranya diperoleh dari membaca buku-buku yang lazim dirujuk untuk permasalahan tertentu¹⁴ dan membiasakan untuk melihat daftar pustaka di belakang buku yang dibaca karena ada kemungkinan terdapat informasi bahan yang diperlukan.¹⁵

Setelah bahan terkumpul peneliti melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen tadi berdasarkan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Dari analisis mendalam tersebut, peneliti membuat pembahasan tentang pemahaman yang diperoleh.¹⁶ Perlu disadari bahwa tidak mungkin suatu pembahasan bersifat objektif karena melibatkan pilihan kata, sudut pandang dan penekanan pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti. Suatu pembahasan dapat diibaratkan seperti dalam pembuatan sebuah potret, yaitu seseorang dapat membuat objek tertentu terlihat menonjol, sementara objek lain cukup dijadikan sebagai latar, dengan kata lain ada bagian yang ingin difokuskan sementara ada pula bagian yang tidak difokuskan.¹⁷ Oleh karena itu pembahasan ini akan menyajikan tulisan argumentatif, yaitu tulisan yang pada

6 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

7 Sujoko Efferin, dkk, *Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 147.

8 Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 159.

9 Suharsimi Arikunto, *loc.cit*.

10 Sujoko Efferin, dkk, *op.cit*, hlm. 149.

11 Sujoko Efferin, dkk, *op.cit*, hlm. 148.

12 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 33.

13 *Ibid.*, hlm. 11.

14 *Ibid.*, hlm. 28.

15 *Ibid.*, hlm. 25.

16 Sujoko Efferin, dkk., *op.cit*, hlm. 148-149.

17 Mestika Zed, *op.cit*, hlm. 57-58.

dasarnya bertujuan untuk meyakinkan para pembaca mengenai kebenaran dari sebuah opini, posisi intelektual, atau keyakinan dari peneliti¹⁹ melalui pembahasan yang dikerangkakan¹⁸ atau didukung oleh berbagai buku teks yang lazim dipergunakan atau disebut juga buku rujukan standar tentang perolehan pengetahuan hukum.

Pembahasan

Upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhi adalah dengan melakukan penemuan hukum, karena menurut Sudikno Mertokusumo pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum²⁰ seperti hakim, jaksa, pengacara, dosen dan mahasiswa fakultas hukum serta mereka yang berkepentingan dalam suatu perkara,²¹ sehingga dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pencari keadilan terutama setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara.²² Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses penemuan hukum oleh hakim.²³ Hakim melakukan penemuan hukum

karena menghadapi peristiwa atau konflik yang harus diselesaikan dan hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dalam bentuk putusan.²⁴ Teori-teori penemuan hukum biasanya dikembangkan dari kegiatan hakim perdata, karena hakim perdata memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam penemuan hukum daripada hakim pidana, dimana Pasal 1 KUH Pidana membatasi ruang gerak hakim pidana.²⁵

Selain pihak-pihak yang berkepentingan di pengadilan, pembentuk undang-undang juga melakukan penemuan hukum dalam merencanakan atau membentuk undang-undang. Hasil penemuan hukum oleh pembentuk undang-undang antara lain berupa interpretasi otentik yang umumnya terdapat pada Bab tentang Ketentuan Umum pasal I dalam undang-undang. Perbedaannya dengan penemuan hukum oleh hakim ialah bahwa hakim menghadapi peristiwa konkret atau konflik, sedangkan pembentuk undang-undang tidak. Hasil penemuan hukum oleh pembentuk undang-undang ini merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dalam bentuk

18 Donny G. Adian, dan Herdito Sandi Pratama, *Logika Terapan-Teknik Berargumentasi: Berpikir Sebagai Kecakapan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 132, 145. Lihat juga Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 219.

19 Septiawan Santana K, *op.cit*, hlm. 232.

20 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

21 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. iii.

22 *Ibid.*, hlm. 50.

23 *Ibid.*, hlm. 49.

24 Sudikno Mertokusumo, *loc.cit*.

25 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit*, hlm. 9.

undang-undang.²⁶ Selain itu pihak yang juga melakukan penemuan hukum adalah notaris dalam menghadapi masalah hukum yang diajukan oleh kliennya untuk dibuatkan akta. Notaris harus menemukan hukumnya dari peristiwa konkret yang diajukan oleh klien untuk kemudian dibuatkan aktanya. Hasil penemuan hukum oleh notaris adalah hukum karena berbentuk akta yang berisi kaidah-kaidah hukum dan mempunyai kekuatan mengikat. Selanjutnya dosen serta peneliti hukum juga melakukan penemuan hukum dalam penulisan dan pembahasan yang bersifat teoretis, sehingga hasil penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi merupakan sumber hukum atau disebut juga sebagai doktrin.²⁷

Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penemuan hukum adalah karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap.²⁸ Kegiatan kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka sudah sewajarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap

selengkap-lengkapnyanya dan jelas se jelas-jelasnya.²⁹ Walaupun terdapat kemungkinan undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas, karena undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.³⁰ Dengan kata lain undang-undang memang tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna undang-undang tetap harus dilaksanakan.³¹ Oleh karena itu maka hakim harus mencari hukumnya dan menemukan hukumnya.³²

Dasar hukum positif hakim melakukan penemuan hukum adalah pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, hakim memiliki kewajiban memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa hakim wajib menemukan hukumnya (lihat juga pasal 22 AB).³³

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁴ (Sumber/Telah ditambahkan sumber pembahasan) terdapat beberapa istilah lain yang sering dianggap lebih tepat untuk

26 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 50-51.

27 *Ibid.*, hlm. 51.

28 *Ibid.*, hlm. 33.

29 *Ibid.*, hlm. 49.

30 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit*, hlm. 12.

31 *Ibid.*, hlm. 3.

32 *Ibid.*, hlm. 4.

33 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 61.

34 *Ibid.*, hlm. 47

aktifitas penemuan hukum seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum. Namun istilah penemuan hukumlah yang paling tepat karena pelaksanaan hukum berarti melaksanakan hukum tanpa ada suatu persengketaan atau suatu permasalahan, berupa pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara dan aparatur negara dalam kehidupan sehari-hari seperti pelaksanaan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya, sementara itu istilah penerapan hukum berarti hakim hanya merupakan corong undang-undang, ini merupakan pandangan yang sudah lampau, sedangkan istilah pembentukan hukum berarti merumuskan peraturan umum yang berlaku sebagai hukum bagi setiap orang yang biasanya dilakukan oleh pembentuk undang-undang, walaupun hakim juga dimungkinkan untuk membentuk hukum dengan syarat apabila putusannya diikuti oleh para hakim lain dan dijadikan pedoman bagi masyarakat, untuk istilah penciptaan hukum berarti hukum itu tidak ada sama sekali oleh karena itu diciptakan dari semula tidak ada menjadi ada, padahal hukum tidak mungkin tidak ada karena terdapat pada perilaku atau peristiwa yang harus digali atau diketemukan, ini berarti hukum tidak selalu berupa kaidah tertulis.³⁵

Sumber-sumber penemuan hukum (Sumber Hukum Formiil/Kami sebagai

penulis tidak menemukan Sumber Hukum Formiil dari bahan penelitian yang telah kami kumpulkan yaitu berupa buku rujukan standar tentang perolehan pengetahuan hukum untuk pembahasan ini, oleh karena itu kami hanya mengganti kalimat yang semula “Sumber utama penemuan hukum” menjadi “Sumber-sumber penemuan hukum”. Selain itu kami juga menambahkan pembahasan pada kalimat dengan tanda berwarna kuning pada kalimat dibawah ini) adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.³⁶ Undang-undang lebih diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis yang lebih menjamin kepastian hukum.³⁷ Akantetapi perlu juga diketahui bahwa walaupun undang-undang lebih diprioritaskan penggunaannya, ini tidak menunjukkan bahwa undang-undang lebih tinggi tingkatannya daripada sumber-sumber hukum lainnya sehingga sumber-sumber hukum lainnya tersebut dapat diabaikan, karena seluruh sumber-sumber hukum tersebut pada dasarnya saling melengkapi.³⁸ Membaca undang-undang tentu tidak mudah, karena mengetahui atau hafal isi undang-undang tentu tidaklah cukup, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana menggunakannya, oleh karena itu, membaca

35 *Ibid.*, hlm. 47-48.

36 *Ibid.*, hlm. 63.

37 *Ibid.*, hlm. 64.

38 Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 67.

undang-undang tidak cukup hanya dengan membaca pasal-pasal saja, tetapi harus pula membaca penjelasan-penjelasan dan juga konsiderannya, bahkan dalam memahami suatu ketentuan dalam undang-undang harus dibaca juga ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang tersebut atau ketentuan dalam perundang-undangan yang lain.³⁹ Selain itu, ketentuan dalam undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada suatu peristiwa, karena untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak pada peristiwa yang konkrit dan bersifat khusus, ketentuan undang-undang tersebut harus diartikan, dijelaskan, ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan suatu peristiwa agar dapat diterapkan.⁴⁰ Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan atau jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi, maka perlu dilakukan pencarian dalam hukum kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis berupa suatu perilaku yang berlangsung dalam waktu lama dan berulang-ulang sehingga menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku tersebut memang patut dilakukan.⁴¹ Sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk melakukan hal ini maka hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.⁴² Jika dalam hukum kebiasaan ternyata tidak diperoleh jawaban, maka perlu dicari dalam yurisprudensi. Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi mengandung beberapa pengertian, yaitu dapat berarti setiap putusan hakim dan dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama hingga tingkat kasasi.⁴³ Membaca suatu putusan tidak cukup hanya membaca diktum atau amarnya saja, tetapi pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukumnya merupakan hal yang penting juga untuk dibaca, karena pada dasarnya yang dicari dalam membaca suatu putusan ialah kaidah hukum yang terdapat dalam putusan itu,⁴⁴ yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar diktum putusan (*ratio decidendi*).⁴⁵

Untuk menemukan hukum tersedia beberapa metode penemuan hukum. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, maka digunakanlah metode interpretasi atau metode penafsiran yang merupakan argumentasi untuk membentuk formulasi (rumusan) suatu putusan.⁴⁶ Berdasarkan

39 *Ibid.*, hlm. 65.

40 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit*, hlm. 12.

41 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 67.

42 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit*, hlm. 37-38.

43 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 68.

44 *Ibid.*, hlm. 71.

45 *Ibid.*, hlm. 70.

46 *Ibid.*, hlm. 73.

alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum Sudikno Mertokusumo menyimpulkan adanya metode interpretasi (1) menurut bahasa atau gramatikal, (2) teleologis atau sosiologis (3) sistematis atau logis (4) historis (5) perbandingan hukum atau komparatif dan (6) futuristis atau antisipatif, sedangkan interpretasi otentik dikatakan tidak termasuk dalam metode interpretasi, karena interpretasi otentik merupakan penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang.⁴⁷ Oleh karena itu interpretasi otentik bukanlah metode penemuan hukum oleh hakim, tetapi merupakan penafsiran oleh pembentuk undang-undang yang terdapat dalam undang-undang.⁴⁸

Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum.⁴⁹ Hal ini karena hukum memerlukan bahasa dimana hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa, seperti peraturan perundang-undangan berbentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun

dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, selain itu untuk mengadakan perjanjian pun diperlukan bahasa.⁵⁰ Untuk mengetahui arti kata yang lazim penggunaannya dalam percakapan sehari-hari hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta keterangan dari ahli bahasa.⁵¹ Metode penemuan hukum ini dianggap merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.⁵²

Penafsiran sistematis atau logis merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan lainnya.⁵³ Hal ini karena terbentuknya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.⁵⁴ Penafsiran sistematis ini dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang dapat memiliki pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam bahasa sehari-hari.⁵⁵

Interpretasi historis atau penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang,⁵⁶ yaitu penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut

47 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 14; lihat juga Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 81.

48 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 81.

49 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 14-15.

50 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 74.

51 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 9.

52 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 74.

53 *Ibid.*, hlm. 76.

54 Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 16-17.

55 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit.*, hlm. 10

56 Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 17.

sejarah terjadinya undang-undang.⁵⁷ Hal ini karena undang-undang merupakan reaksi terhadap kebutuhan untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis.⁵⁸ Dari sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁰ Untuk mengetahui maksud pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen di lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang mendahului terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁰ Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukumnya merupakan penafsiran yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.⁶¹

Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dengan lebih memperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata yang terdapat pada undang-undang tersebut dimana metode ini akan digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana peraturan perundang-undangan

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru dengan kata lain ketentuan undang-undang yang sudah lama dan tidak sesuai lagi digunakan sebagai sarana atau alat untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekarang.⁶²

Interpretasi komparatif merupakan penafsiran dengan memperbandingkan ketentuan hukum,⁶³ yaitu kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dapat diperoleh dengan cara memperbandingkan, terutama bagi hukum yang berasal dari perjanjian internasional, dimana selain hukum perjanjian internasional penggunaan metode ini terbatas.⁶⁴

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi berupa penjelasan ketentuan undang-undang dengan mengacu pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum,⁶⁵ yaitu dalam rancangan undang-undang.⁶⁶

Metode-metode interpretasi yang telah diuraikan diatas sering digunakan secara bersama-sama, sehingga tidak mudah menentukan batas-batasnya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam tiap interpretasi terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, historis dan teleologis.⁶⁷ Hal ini karena tidak ada undang-undang yang memberi petunjuk

57 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 78.

58 Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 18.

59 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *loc.cit.*

60 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 78-79.

61 Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*; lihat juga Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *loc.cit.*

62 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 79; lihat juga Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 15-16.

63 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 80.

64 Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 19.

65 *Ibid.*,

66 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 80.

67 *Ibid.*, hlm. 83.

bagaimana menafsirkan, oleh karena itu tidak ada prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum,⁶⁸ sehingga hakim akan memilih metode berdasarkan pertimbangan metode yang paling meyakinkan dan memuaskan,⁶⁹ yaitu putusan yang paling dapat diterima oleh masyarakat.⁷⁰ Pemilihan mengenai metode interpretasi merupakan otonomi hakim dalam penemuan hukum. Di dalam putusan-putusan hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan yang menentukan untuk pemilihan metode tertentu.⁷¹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam menggunakan berbagai metode interpretasi hasilnya dapat berbeda, sehingga hakim harus mengambil pilihan. Dan pilihan itu ditentukan oleh pandangan tentang pertanyaan putusan manakah yang paling dapat diterima oleh masyarakat,⁷² dengan kata lain penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Dari hasil atau akibat penemuan hukum berbagai metode interpretasi dapat dibedakan antara interpretasi restriktif dan ekstensif.⁷³ Pada umumnya metode interpretasi gramatikal itu bersifat membatasi, interpretasi historis bersifat memperluas. Interpretasi teleologis

sifatnya memperluas, sedangkan metode interpretasi sistematis bersifat membatasi.⁷⁴

Interpretasi digunakan dalam hal terdapat peraturan yang tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa, sementara dapat pula terjadi ketika hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya, yaitu ketika hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan peraturan yang harus diisi atau dilengkapi, karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (lihat juga pasal 22 AB), melalui penggunaan metode berpikir analogi (*argumentum per analogiam*), metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum.⁷⁵ Dengan demikian jika suatu perbuatan, meski tidak diatur dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan tersebut dilarang. Sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka perbuatan tersebut dibolehkan. Jika ada kekosongan hukum maka hakim memiliki kewajiban untuk mengisi dan melengkapinya.⁷⁶

68 *Ibid.*, hlm. 82.

69 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 20.

70 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 83; lihat juga Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 13.

71 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 20-21.

72 Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

73 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 81.

74 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 82.

75 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 85; lihat juga Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 21.

76 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 84.

Metode *argumentum per analogiam* atau analogi digunakan ketika peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada suatu peristiwa hakim memperluasnya,⁷⁷ dengan cara menerapkan suatu peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa tersebut mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang.⁷⁸ Analogi dilakukan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang “analog” atau mirip, yaitu tidak hanya sekedar peristiwa yang akan diputus itu mirip dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.⁷⁹ Dengan analogi peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.⁸⁰

Argumentum a contrario digunakan ketika suatu peristiwa tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang, dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang mengatur hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka pengaturan tersebut terbatas pada peristiwa tersebut

dan untuk peristiwa sebaliknya berlaku pula kebalikannya.⁸¹ Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁸²

Penyempitan hukum digunakan ketika ruang lingkup suatu peraturan perundang-undangan terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.⁸³ Penyempitan hukum dilakukan dengan membentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum agar dapat diterapkan pada peristiwa tertentu dengan memberi ciri-ciri.⁸⁴

Apabila hakim akan menjatuhkan keputusan, maka hakim tersebut akan berusaha agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat, atau setidaknya berusaha agar pihak-pihak yang dapat menerima putusannya seluas mungkin.⁸⁵ Agar dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya telah tepat dan benar.⁸⁶ Keyakinan hakim itu harus

77 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm.86; lihat juga Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.* hlm. 22.

78 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.* hlm. 22.

79 *Ibid.*, hlm. 24.

80 Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*; lihat juga Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *loc.cit.*

81 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 89.

82 *Ibid.*,

83 *Ibid.*, hlm. 91.

84 *Ibid.*, hlm. 92.

85 *Ibid.*, hlm. 116.

86 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.* hlm. 40.

didasarkan pada sesuatu yang disebut sebagai alat bukti, dimana dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil atau keyakinannya kepada hakim yang akan memberikan putusan terhadap perkara mereka,⁸⁷ sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hakim didasarkan pada pembuktian yaitu upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸⁸ Namun dalam praktek peradilan seringkali dijumpai ketidakpuasan para pencari keadilan yang merasa kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap kurang profesional terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang memicu kontroversi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁸⁹

Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹⁰ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menjaga ketertiban masyarakat.⁹¹ Tanpa ada kepastian hukum setiap orang tidak akan tahu apa yang harus

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dengan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.⁹² Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, sehingga tidak diharapkan karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut.⁹³ Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, keadilanlah yang lebih diutamakan.⁹⁴ Hal ini karena kalau diperhatikan kepala putusan hakim akan selalu berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan harus lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara.⁹⁵

87 Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 2.

88 *Ibid.*, hlm.10.

89 Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm. 6, 7, 15.

90 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit*, hlm. 1.

91 *Ibid.*, hlm. 2.

92 *Ibid.*, hlm. 3.

93 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *loc.cit*.

94 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 118.

95 Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm.13.

Apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang maka digunakanlah asas *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu apabila terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dimana undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru, apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang berlaku berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sedangkan apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan maka berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar.⁹⁶

Menurut Sunaryati Hartono pada dasarnya kegiatan sehari-hari seorang dosen, hakim, pengacara, jaksa, notaris, konsultan hukum dan penulis di bidang hukum merupakan penelitian hukum,⁹⁷ seperti pada keperluan praktik, praktisi melakukan penelitian untuk mempertahankan argumentasi masing-masing yakni berupa kuasa penggugat melakukan penelitian dalam rangka memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, kuasa tergugat juga melakukan hal yang sama dalam rangka mematahkan dalil-dalil penggugat, demikian

pula Jaksa yang melakukan penelitian dalam rangka mempertajam dan memperkuat argumentasi dalam dakwaan, hakim pun melakukan penelitian dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atas pokok perkara bagi putusannya,⁹⁸ yaitu sebelum meyakini argumentasi jaksa atau penasehat hukum, hakim wajib menggali fakta hukum dalam suatu perkara sehingga pada akhirnya *ratio decidendi* atau alasan-nya menjadi paling kuat dan sangat meyakinkan.⁹⁹ Dengan demikian melalui penelitian, kita dapat menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu.¹⁰⁰

Dalam melakukan penelitian hukum untuk keperluan praktik seperti uraian diatas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan nonhukum yang diyakini mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menyusun kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun

96 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 32.

97 C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 131&139.

98 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 225.

99 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

100 Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 57.

di dalam kesimpulan.¹⁰¹ Sedangkan tugas hakim secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu: (1) mengkonstatir (mengkonstatasi), yaitu menetapkan suatu peristiwa kongkrit telah terjadi melalui pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan, sehingga tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa kongkrit benar-benar telah terjadi, (2) mengkwalifisir (mengkwalifikasi), yaitu menemukan hukum yang diterapkan terhadap peristiwa yang telah dikonstatir, (3) mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.¹⁰²

Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa terdapat kemungkinan perbedaan pendapat tentang makna suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu peneliti hukum harus mengajukan alasan atau argumen untuk mendukung apa yang dipandang sebagai makna ketentuan hukum yang paling tepat atau paling dapat diterima yang disebut sebagai argumentasi yuridis atau penalaran hukum,¹⁰³ sehingga dapat diketahui bahwa

argumentasi pada dasarnya merupakan upaya untuk mengemukakan alasan, landasan dan pembenaran bagi suatu pendapat yang kekuatannya diuji dalam diskusi.¹⁰⁴ Dengan kata lain argumentasi yang meyakinkan adalah argumentasi yang dapat dipertahankan dari segala sanggahan.¹⁰⁵

Penelitian hukum dalam konsep seperti yang telah dibahas diatas pada dasarnya adalah aktivitas untuk menemukan norma-norma sebagai dasar pembenaran kepada putusan dalam rangka penyelesaian suatu perkara yang disebut sebagai penelitian doktrinal.¹⁰⁶ Selain itu penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum normatif karena pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku,¹⁰⁷ berupa norma hukum positif tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pembentuk perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan dibawahnya, norma tertulis yang dibentuk lembaga peradilan serta norma hukum tertulis yang dibuat pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak.¹⁰⁸

101 *Ibid*, hlm. 215.

102 Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm. 20-21.

103 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112; Lihat juga Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.110.

104 *Ibid.*, hlm. 113; Lihat juga *Ibid*, hlm 111.

105 I Made Pasek Diantha, *op.cit*, hlm. 155-156.

106 Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

107 Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit* hlm. 118; Lihat juga Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 127.

108 Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Untuk penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) seperti dibahas diatas masalah-masalah yang perlu diprioritaskan adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum yang berlaku,¹⁰⁹ karena konsep hukum ini meningkatkan kebutuhan akan informasi hukum positif untuk praktek maupun untuk studi berupa bahan-bahan hukum yang lengkap.¹¹⁰ Inventarisasi tersebut dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari seluruh perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku,¹¹¹ yaitu seluruh aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan/atau badan-badan pemerintahan berupa seluruh produk badan legislatif mulai dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok hingga Undang-Undang Pelaksanaan, produk hukum yang berasal dari badan eksekutif seperti Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu dan peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, baik tingkat pusat seperti Keppres dan Kepmen, maupun tingkat daerah. Keputusan-keputusan komisi negara atau komisi-komisi nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang juga termasuk kedalam bahan hukum ini. Selain itu bahan hukum yang masih termasuk ke dalam bahan hukum primer ini adalah seluruh amar putusan badan yudisial, yaitu produk

berbagai pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat tinggi, dari pengadilan yang berstatus sebagai pengadilan umum hingga ke pengadilan yang berstatus khusus seperti pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Berikutnya masih termasuk kedalam bahan-bahan hukum primer adalah produk-produk hukum dari badan-badan internasional, baik yang telah diratifikasi maupun belum.¹¹² Sementara itu, yang termasuk ke dalam bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu negara, berupa bahan hukum yang tidak bisa dikategorikan sebagai hukum positif. Secara rinci yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder ini antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, berbagai jurnal hukum yang berisi pembahasan-pembahasan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen seminar hukum, memori opini hukum, monograp, buletin atau terbitan lain yang memuat debat dan hasil dengar pendapat diparlemen, deklarasi serta berbagai terbitan lainnya. Walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder memiliki pengaruh yang cukup persuasif dalam pembentukan hukum karena berasal dari tokoh yang memiliki reputasi akademik atau profesionalitas yang tinggi.¹¹³

109 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 137-138.

110 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit*, hlm. 26.

111 *Ibid.*, hlm. 27.

112 *Ibid.*, hlm. 67-68.

113 *Ibid.*, hlm. 69-70.

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar karena sebelum dapat menemukan norma hukum untuk suatu perkara tertentu, harus diketahui lebih dahulu apa yang merupakan hukum yang berlaku.¹¹⁴ Dengan demikian penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu mensyaratkan telah terselesaikannya inventarisasi hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum ini norma hukum diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara dipakai sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan berupa hukum yang berlaku untuk suatu perkara.¹¹⁵ Dengan kata lain dalam penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau peraturan preskriptif penalaran deduksi yang akan digunakan, yaitu proses bernalar yang bermula dari pernyataan umum agar diperoleh simpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu.¹¹⁶

Bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah dibahas sangatlah banyak dan sangat cepat berubah, sehingga diperlukan upaya untuk selalu menata ulang bahan-bahan hukum yang telah ada dalam rangka memutakhirkan bahan-bahan hukum tersebut dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan

hukum yang terus bertambah dan berubah-ubah secara terus menerus lalu kemudian menyusunnya ke dalam suatu koleksi yang terorganisasi rapi dengan tujuan memudahkan penelusuran kembali melalui pembuatan katalog dan indeks.¹¹⁷

Terdapat tiga kegiatan pokok dalam penelitian inventarisasi hukum yang berlaku yaitu pertama, penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan penelusuran bahan-bahan hukum, kedua melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum, ketiga melakukan pengorganisasian bahan-bahan hukum yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif¹¹⁸ berupa klasifikasi sistematis, berikut pengembangan metode untuk penemuan kembali secara mudah yaitu pengembangan *retrieval method*.¹¹⁹ Pengorganisasian bahan hukum yang telah terkumpul dapat dilakukan berdasarkan urutan tahun pengundungannya maupun menyusunnya berdasarkan atas materi yang terdapat dalam bahan hukum tersebut.¹²⁰ Tujuan melakukan inventarisasi dan pengorganisasian ini adalah diperolehnya bahan-bahan hukum yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan hukum,¹²¹ sehingga hasilnya akan mempermudah mereka di dalam melaksanakan peranannya

114 Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.10.

115 *Ibid.*, hlm. 12-13.

116 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 90.

117 *Ibid.*, hlm. 71-73.

118 Ronny H Soemitro, *op.cit.*, hlm. 11.

119 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

120 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 65.

121 *Ibid.*,

secara sistematis dan konsisten.¹²² Setiap upaya mencari dan menemukan aturan hukum itu pada hakikatnya adalah suatu upaya yang hasilnya akan digunakan untuk menunjang suatu argumen yuridis dalam upaya memenangkan sengketa dalam suatu perkara, oleh karena itu kemahiran dalam mencari bahan-bahan hukum sangat menentukan. Kemahiran itu tidak hanya terbatas terkait dengan penguasaan teknik penelusuran bahan-bahan hukum, akan tetapi terkait juga dengan pemilihan bahan mana diantara bahan yang ditemukan paling sah, akurat dan dapat diandalkan untuk memperkuat argumen.¹²³

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mencari melalui internet,¹²⁴ karena saat ini kedua bahan hukum ini tidak hanya dapat diakses dalam bentuk cetakan, akan tetapi juga dapat ditelusuri lewat situs-situs internet.¹²⁵ Penggunaan internet untuk penelitian hukum sangat penting karena berkaitan dengan kemudahan untuk memperoleh bahan hukum.¹²⁶ Dengan demikian berbagai kemudahan dan fasilitas yang ada pada situs-situs internet harus dimanfaatkan secara optimal dalam penelitian hukum.¹²⁷ Kunci utama untuk mencari informasi melalui

internet adalah dengan memanfaatkan *search engine* dan menentukan kata kunci (*keywords*) dari suatu bahan yang ingin diteliti.¹²⁸ Mencari informasi tanpa kata kunci (*keywords*) dapat menyebabkan *never-ending search*, karena ada miliaran dokumen yang dapat diakses melalui internet dimana jumlah itu akan terus bertambah dari waktu ke waktu.¹²⁹ Melalui mesin pencari (*search engine*) pada internet maka peneliti hukum akan dengan mudah menemukan bahan-bahan hukum dengan cara mengetik nama bahan hukum yang dicari maka mesin pencari akan menyediakan bahan hukum dimaksud. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dapat diunduh (*download*) untuk disimpan pada alat penyimpanan data (*flash disk* atau *cd room*) untuk memudahkan penggunaannya sewaktu-waktu.¹³⁰

Apabila akan melakukan penelitian hukum normatif, maka penelitian akan dimulai dari suatu peristiwa hukum yang selanjutnya dicari rujukannya pada peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum dari para ahli dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian

122 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 255.

123 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 72-73.

124 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 160.

125 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 69.

126 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 140.

127 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 324.

128 *Ibid.*, hlm. 331.

129 *Ibid.*,

130 Dyah Ochtorina Susantidan A'an Efendi, *op.cit.*, hlm.141.

hukum normatif ini hanya berhenti disini saja, tidak sampai pada perilaku manusia yang terkait dengan hukum tersebut.¹³¹ Oleh karena itu menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, penelitian hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena hukum dibentuk dan diterapkan oleh manusia yang hidup bermasyarakat, sehingga keberadaan hukum tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan hukum tersebut.¹³² Berdasarkan hal itu maka diperlukan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, berupa perilaku yang timbul karena berinteraksi dengan hukum.¹³³ Penelitian ini tidak memberikan argumentasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif tetapi hanya memaparkan fakta atau perilaku secara sistematis yang dapat dilakukan secara kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.¹³⁴ Ilmu-ilmu sosial yang mengkaji hukum, seperti sosiologi hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi, menyajikan penelitian empiris dalam pengembangan teori di bidang masalah-masalah hukum. Ilmu-ilmu sosial tersebut menyediakan informasi

kepada akademisi hukum, praktisi hukum dan pengambil kebijakan berkenaan dengan hukum. Ini berarti bahwa penelitian hukum empiris berfungsi untuk memberi informasi hukum, sementara penelitian normatif berguna untuk membentuk argumentasi hukum.¹³⁵ Dengan bantuan penelitian-penelitian yang bersifat empiris, sebagai ilmu normatif, ilmu hukum tidak perlu menjadi bagian dari ilmu empiris tersebut, tetapi menggunakan bahan yang diolah dari ilmu empiris sebagai masukan (*input*) terhadap analisis bahan hukum yang diteliti.¹³⁶ Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tersebut berkaitan dengan apa yang ada, yaitu meneliti kebenaran fakta, bukan apa yang seharusnya,¹³⁷ sehingga jika yang dicari adalah kaidah hukum, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa metode penemuan hukum yang antara lain terdiri dari metode penafsiran, argumentasi dan sebagainya,¹³⁸ jika yang dicari terkait perilaku atau fakta, maka metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode empiris atau sosiologis.¹³⁹ Dengan kata lain ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, sedangkan ilmu hukum bukan hanya semata-

131 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Ahmad, *op.cit*, hlm. 36-37.

132 *Ibid.*, hlm. 44.

133 *Ibid.*, hlm. 51.

134 *Ibid.*, hlm. 53.

135 I Made Pasek Diantha, *op.cit*, hlm.102.

136 Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 302.

137 Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 36.

138 *Ibid.*, hlm. 37.

139 *Ibid.*, hlm. 38.

mata meneliti kebenaran kaidah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaidah hukum, yaitu tentang apa yang seyogianya dilakukan (preskriptif).¹⁴⁰

Menurut I Made Pasek Diantha peneliti hukum sebaiknya menguasai kedua jenis metode penelitian hukum ini, karena keduanya sama-sama penting untuk diteliti.¹⁴¹ Penggunaannya tergantung keperluannya, jika yang diperlukan adalah kejelasan tentang perilaku terhadap hukum, digunakan metode penelitian hukum empiris, dan jika yang diperlukan adalah argumentasi hukum maka digunakanlah metode penelitian hukum normatif.¹⁴² Dapat dikatakan pula tergantung pada permasalahan hukumnya yang ingin diselesaikan, jika permasalahan berada pada norma hukum maka digunakan metode penelitian hukum normatif dan jika permasalahan terletak pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum maka digunakan metode penelitian hukum empiris.¹⁴³ Keduanya sama-sama penting untuk diteliti, sehingga disarankan peneliti hukum tidak meneliti ilmu hukum hanya dari satu jenis penelitian hukum saja.¹⁴⁴ Saran ini dikemukakan karena terdapat banyak kritikan keras dari para pendukung penelitian hukum normatif yang mengatakan bahwa mempelajari hukum secara sosiologis empiris hanya akan membuang-buang waktu saja, sebab pengetahuan yang diperoleh tidak

bisa digunakan untuk kepentingan praktis penyelesaian kasus hukum yang dihadapi. Argumentasi ini memang kuat dan tidak dapat dibantah. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga bahwa jika para pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan perundangan tidak disertai pertimbangan sosiologis maka produk perundangan yang dihasilkan tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya di dalam masyarakat, atau ketika ahli hukum merumuskan draf kontrak tanpa melihat kenyataan di masyarakat tentang kepentingan para pihak sebagai bahan yang perlu dijadikan pertimbangan, maka kontrak tersebut akan banyak diselewengkan pada waktu diberlakukan. Bagi hakim yang memeriksa perkara tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis dalam putusannya, maka putusan tersebut tidak akan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyarankan kepada para ahli hukum yang berpandangan normatif maupun para ahli hukum yang mendukung penelitian hukum sosiologis empiris, agar dapat melihat sisi positif dari masing-masing pandangan untuk kemudian diambil manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum,¹⁴⁵ sehingga diperlukan pendekatan untuk saling menyapa dan berinteraksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial.¹⁴⁶

---

140 Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

141 I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 11.

142 *Ibid.*, hlm. 13.

143 *Ibid.*, hlm. 110.

144 *Ibid.*, hlm. 11.

145 I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 45-46.

146 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 42.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hukum sebagai objek penelitian merupakan objek penelitian yang multi-interpretif, sehingga menghasilkan keragaman konseptual.¹⁴⁷ Perspektif yang berbeda melahirkan metode berpikir dan metode penelitian yang berbeda,¹⁴⁸ sehingga tidak ada konsep tunggal mengenai hukum.¹⁴⁹ Dengan demikian sebenarnya terlihat suatu keterkaitan yang erat antara pandangan konsep hukum dengan metode yang dipilih dan digunakan sehingga terdapat kebebasan untuk memilih bagi peneliti untuk menggunakan suatu metode penelitian yang paling sesuai dengan penelitiannya.¹⁵¹ Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap berbagai jenis metode penelitian hukum tersebut, baik metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian hukum sosiologis saat ini diakui keberadaannya dan digunakan dalam kurikulum fakultas hukum di seluruh Indonesia.¹⁵¹

Soetandyo Wignjosoebroto menulis buku metode penelitian hukum yang tidak hanya membahas masalah tahap-tahap melakukan penelitian hukum, namun membahas juga perkembangan hukum sejak masuknya

pendidikan hukum di Indonesia yang dirintis oleh Belanda, munculnya hukum adat serta perkembangan ilmu-ilmu sosial.¹⁵² Sepanjang sejarah perkembangannya, hingga saat ini Soetandyo Wignjosoebroto telah mencatat sekurang-kurangnya 4 konsep yang harus diperhatikan oleh setiap pengkaji dan peneliti hukum. Dari keempat konsep tentang hukum itu tidak dapat ditentukan konsep mana yang paling unggul karena mampu menjawab segala persoalan.¹⁵³

Konsep hukum yang pertama yaitu konsep hukum yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral dan diklaim bernilai universal sehingga disebut sebagai ajaran hukum alam.¹⁵⁴ Tipe kajiannya adalah filsafat hukum, menggunakan metode penelitian logika deduksi, berdasarkan premis normatif yang diyakini bersifat tidak perlu pembuktian.¹⁵⁵ Konsep hukum ini terdapat dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal yang di Indonesia disebut sebagai masyarakat hukum adat, yaitu asas-asas moral yang diakui oleh masyarakat sebagai pedoman normatif yang hidup untuk menuntun perilaku-perilaku yang pantas di dalam masyarakat walaupun tidak dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara.¹⁵⁶

147 *Ibid.*, hlm. 18.

148 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm.12-13.

149 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 32.

150 Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 66-67.

151 Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8; Lihat juga Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 27-34.

152 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. vi.

153 *Ibid.*, hlm. 20.

154 *Ibid.*, hlm. 21.

155 Burhan Ashshofa, *op.cit.*, hlm. 10.

156 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 23.

Konsep hukum kedua adalah hukum sebagai undang-undang dan amar putusan hakim. Dalam konsep ini hukum tidak berupa asas-asas abstrak yang tersimpan di dalam kesadaran dan ingatan masyarakat tetapi berbentuk norma-norma tertulis, berlaku umum pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu.¹⁵⁷ Dengan kata lain hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books* menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Selain itu dalam konsep ini hukum juga merupakan apa yang diputuskan oleh hakim yaitu sebagai *judge-made-law* dengan tipe kajiannya adalah *law as it is decided by judges through judicial processes* dengan menggunakan baik metode penelitian normatif (doktrinal) seperti di atas, dan juga non doktrinal dengan menggunakan logika induktif yang mengkaji *court behaviours*.¹⁵⁸

Konsep hukum ketiga adalah konsep hukum dalam bentuk pola perilaku sosial. Hukum sebagai objek kajian ternyata tidak hanya dikonsepsikan dari dua perspektif normatif yang telah dibahas, karena telah ada peneliti hukum yang membahas permasalahan

hukum dengan membahasnya dari perspektif lain, yaitu perspektif sosiologis dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai sistem norma, melainkan sebagai fakta sosial berupa keteraturan perilaku dalam suatu masyarakat.¹⁵⁹ Dengan demikian menurut konsep ini hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang merupakan variabel sosial empiris. Tipe kajiannya adalah sosiologi hukum yang mengkaji *law as it is in society* dengan menggunakan metode penelitian sosial/non-doktrinal, pada umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).¹⁶⁰

Konsep hukum keempat adalah konsep hukum sebagai makna dalam proses interaksi antar warga berupa seluruh pengertian dan pengartian yang diberikan oleh para subjek hukum tentang apa yang benar dan apa yang salah.¹⁶¹ Apabila hukum dikonsepsikan sebagai produk interaksi sosial yang memiliki makna-makna yang berasal dari para pelaku sosial, maka metode penelitian refleksif-kualitatif yang digunakan.¹⁶² Tipe kajiannya adalah sosiologi dan/atau antropologi hukum yang mengkaji *law as it is in (human) action*¹⁶³ dengan *field-interview* dan atau *field-observation* baik secara berstruktur atau tidak akan digunakan sebagai metode utama.¹⁶⁴ Dalam kajian sosiologis yang mengkonsepkan

157 *Ibid.*, hlm 26.

158 Burhan Ashshofa, *op.cit.*, hlm. 10.

159 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 29-30.

160 Burhan Ashshofa, *op.cit.*, hlm. 11.

161 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 31-32.

162 *Ibid.*, hlm. 41.

163 Burhan Ashshofa, *op.cit.*, hlm. 11.

164 Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 85.

hukum sebagai pola perilaku ini maka model penalaran yang digunakan adalah induksi, yaitu proses bernalar yang bermula dari pernyataan-pernyataan khusus untuk memperoleh suatu simpulan yang berlaku umum.¹⁶⁵

Menurut Anthon F. Susanto penelitian hukum normatif dan hukum empiris-kuantitatif tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang tertindas oleh kebijakan hukum, dimana penelitian-penelitian tersebut memiliki kecenderungan memihak kepada kepentingan yang berkuasa,¹⁶⁶ karena penelitian-penelitian tersebut hanya membahas aturan, asas dan prinsip serta keterkaitan mekanis angka-angka yang kaku, tidak melakukan aksi perubahan atau pemberdayaan.¹⁶⁷ Oleh karena itu diperlukan penelitian hukum yang mampu mendatangkan perubahan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu penelitian hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menawarkan berbagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi.¹⁶⁸ Penelitian hukum dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai penelitian hukum transformatif-partisipatoris.¹⁶⁹ Penelitian hukum ini mendorong peneliti agar tidak hanya melakukan proses penelitian namun juga dapat membantu memperbaiki kondisi masyarakat yang tertindas, dimana peneliti

hukum tidak cukup hanya menjadi pengamat atau bergabung menjadi partisipan dalam penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kemudian meninggalkan masyarakat setelah penelitiannya selesai, karena menganggap tugas peneliti telah selesai pula, tetapi diperlukan pula agenda aksi yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan keberdayaannya.¹⁷⁰

Dalam penelitian hukum ini terdapat pengertian partisipatoris-emansipatoris yang menunjukkan keterlibatan aktif partisipan dan juga kesetaraan bagi masyarakat yang mengalami marjinalisasi/pelemahan/terpinggirkan oleh kekuasaan serta kebijakan hukum yang memiliki sifat represif. Penelitian hukum ini mencakup beberapa langkah utama yaitu pengalaman, refleksi, supervisi dan upaya aksi. Selain itu penelitian hukum ini merupakan penelitian yang membangun keterikatan yang lebih dekat antara peneliti dengan yang ditelitinya yaitu masyarakat dan kehidupannya.¹⁷¹ Pelibatan aktif partisipan (masyarakat tidak mampu/kurang beruntung) dalam setiap proses penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini artinya partisipan tidak semata-mata sebagai informan yang berperan hanya sebagai sumber data namun juga

165 Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 90.

166 Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 27.

167 *Ibid.*, hlm. 175.

168 *Ibid.*, hlm. 176.

169 *Ibid.*, hlm. 181.

170 *Ibid.*, hlm. 147.

171 *Ibid.*, hlm. 183.

berperan dalam pengumpulan data dan juga melakukan analisis data serta pengambilan kesimpulan, sehingga partisipan mengetahui, menyadari dan kemudian dapat mengambil tindakan yang relevan dengan masalah yang mereka hadapi. Partisipan yang terlibat dalam penelitian akan dapat merasakan manfaatnya karena mereka terlibat seluruhnya di dalam kegiatan penelitian, oleh karena itu penting memperhatikan tanggapan dan reaksi mereka dalam seluruh tahapan kegiatan penelitian.¹⁷² Penyusunan agenda aksi juga menjadi proses penting untuk mengaktualisasikan hasil-hasil penelitian, karena dalam model penelitian ini agenda aksi dapat langsung diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi.¹⁷³

Secara personal Anthon F. Susanto memiliki pengalaman melakukan penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini di Ciamis Jawa Barat tahun 2010 yang pendanaannya berasal dari Dikti dimana masyarakat terlibat sebagai narasumber, partisipan aktif dari sejak penyusunan rancangan penelitian, proses pencarian dan pengumpulan data, analisis data dan tentu saja pengambilan kesimpulan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan hasil penelitian. Pelibatan masyarakat dalam penelitian ini cukup efektif sehingga kesulitan di lapangan

lebih mudah diatasi karena partisipan juga terlibat langsung dalam proses analisis serta pengambilan kesimpulan. Penelitian ini membutuhkan langkah-langkah dalam membangun kepercayaan dengan partisipan, karena adanya anggapan bahwa dalam melakukan penelitian terdapat kecenderungan melihat masyarakat yang diteliti sebagai komoditas atau objek dan akibatnya masyarakat yang diteliti memandang peneliti sebagai penindas yang hanya peduli ketika ada keperluan dan kemudian menghilang tanpa jejak setelah keperluan mereka selesai.¹⁷⁴

Penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini memiliki kesamaan dengan salah satu prinsip *counter accounting*, yaitu prinsip dedikasi untuk pemberdayaan melalui pengurangan bahkan penghilangan keterasingan atau keterpinggiran, sehingga praktisi atau sasaran dari hasil penelitian dapat memperoleh manfaat langsung dari suatu kegiatan penelitian akuntansi.¹⁷⁵ Selain itu penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini juga memiliki kesamaan dengan prinsip *counter accounting* yang lain, yaitu prinsip tidak menggulingkan atau menggantikan prinsip *mainstream* yang berlaku umum tetapi tetap selalu menjadi alternatif,¹⁷⁶ karena menurut Anthon F. Susanto penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini tidak bermaksud menggantikan keberadaan

---

172 *Ibid.*, hlm. 184.

173 *Ibid.*, hlm. 205.

174 *Ibid.*, hlm. 195.

175 Dayno Utama, *op.cit.*

176 *Ibid.*,

penelitian hukum yang telah ada seperti penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris-kuantitatif dan penelitian hukum empiris-kualitatif, tetapi dimaksudkan sebagai sebuah alternatif yang menawarkan langkah-langkah pemberdayaan bagi masyarakat tertindas yang tidak ada dalam penelitian hukum lainnya.¹⁷⁷

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhi adalah dengan melakukan penemuan hukum, karena penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pencari keadilan terutama para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Akantetapi penemuan hukum lazimnya dilakukan oleh hakim yang memiliki tugas untuk mencari atau menemukan hukum karena menghadapi peristiwa atau konflik dalam perkara yang harus diselesaikan. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Untuk menemukan hukum terdapat beberapa metode penemuan hukum. Pilihan metode yang akan diterapkan oleh hakim ditentukan oleh pertimbangan metode yang paling meyakinkan dan memuaskan, yaitu putusan yang paling dapat

diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya telah tepat dan benar. Dengan memiliki pengetahuan penemuan hukum ini maka peneliti *counter accounting* dapat memenuhi aspek hukum dalam melakukan penelitian dengan cara meyakinkan pihak lain bahwa aspek hukum telah terpenuhi sehingga pihak lain tersebut dapat menerima pemenuhan aspek hukum yang dilakukan, seperti hakim yang melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

Dari pembahasan diatas juga dapat diketahui bahwa hukum memiliki keragaman konseptual. Dari keragaman konseptual tersebut terdapat penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan beberapa prinsip *counter accounting*, yaitu penelitian hukum transformatif-partisipatoris. Pada akhirnya dari pembahasan diatas juga dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak membahas aspek hukum yang harus dipenuhi oleh peneliti *counter accounting*, tetapi upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti *counter accounting* untuk dapat memenuhi aspek hukum dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan dengan membahas aspek hukum yang harus dipenuhi oleh peneliti *counter accounting* dalam melakukan penelitian.

---

177 Anthon F. Susanto, *op.cit.*, hlm. 216.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Adian, Donny Gahril dan Herdito Sandi Pratama. *Logika Terapan-Teknik Berargumentasi: Berpikir Sebagai Kecakapan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Efferin, Sujoko, dkk. *Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Fajar ND., Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Parsipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Artikel Jurnal

- Utama, Dayno. "Upaya Perumusan Prinsip Counter Accounting dengan Memanfaatkan Filosofi Punk Sebagai Counter Culture". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 6, No. 3*, (Desember 2015), doi: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6036>.
- Utama, Dayno. "Islamisasi Prinsip Counter Accounting". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Vol. 11, No. 2*, (Maret 2017), doi: <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.477-498>.